Tourism and Hospitality Research
Vol. 1 No. 1, September 2025, pages: 30-36
e-ISSN 3110-2603 | DOI: https://doi.org/10.70716/thr.v1i1.60

Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Konservasi Lingkungan

Nabila Zahra Hanum
Program Studi Pariwisata, Universitas Udayana, Bali, Indonesia
**Corresponding Author: nabila.zhanum@unud.ac.id*

Article History

Manuscript submitted:
10 August 2025
Manuscript revised:
15 August 2025
Accepted for publication:
16 August 2025

Keywords

ecotourism, environmental conservation, sustainable development, local participation, tourism strategy

Abstract

Ecotourism has emerged as a sustainable alternative to mass tourism, offering a way to balance economic development and environmental conservation. This study explores strategic approaches to ecotourism development that actively support environmental conservation efforts. Employing a qualitative descriptive method, data were collected through field observations, interviews with stakeholders, and a review of relevant literature. The research was conducted in a protected natural area in Indonesia that has recently promoted ecotourism initiatives. Findings suggest that community involvement, environmental education, regulation enforcement, and infrastructure development are crucial components of successful ecotourism strategies. The study highlights how properly implemented ecotourism can increase conservation awareness, reduce environmental degradation, and provide sustainable livelihoods for local communities. These findings can inform policymakers and stakeholders in designing ecotourism policies that are both ecologically and economically beneficial.

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license

How to Cite: Hanum, N.Z. (2025). Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Konservasi Lingkungan. *Tourism and Hospitality Research, 1*(1), 30–36. https://doi.org/10.70716/thr.v1i1.60

Pendahuluan

Pariwisata berkelanjutan kini menjadi perhatian utama dalam pengelolaan kawasan wisata, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti taman nasional, hutan lindung, kawasan pesisir, dan daerah pegunungan. Meningkatnya kesadaran global terhadap krisis lingkungan, seperti perubahan iklim, degradasi habitat, dan kepunahan spesies, mendorong perlunya pendekatan wisata yang lebih bertanggung jawab. Dalam konteks ini, ekowisata hadir sebagai salah satu bentuk pariwisata alternatif yang menekankan pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pendidikan lingkungan bagi wisatawan. Ekowisata tidak hanya menawarkan pengalaman wisata yang menyatu dengan alam, tetapi juga bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta memaksimalkan kontribusi positif terhadap konservasi dan kesejahteraan komunitas lokal (Weaver, 2001).

Di Indonesia, potensi pengembangan ekowisata sangat besar mengingat negara ini termasuk dalam salah satu negara mega-biodiversitas di dunia, dengan ribuan spesies flora dan fauna endemik yang tersebar di berbagai ekosistem unik, seperti hutan tropis Kalimantan, terumbu karang Raja Ampat, dan pegunungan Papua. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang beragam dan sering kali terintegrasi erat dengan alam, yang memperkaya pengalaman ekowisata. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masih banyak kawasan wisata alam yang dikelola secara konvensional dengan orientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial. Oleh karena itu, transformasi pendekatan pariwisata menuju model ekowisata yang holistik dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Namun demikian, praktik ekowisata masih menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam penerapannya di lapangan. Meskipun konsep ekowisata telah dikenal luas dan banyak diadopsi dalam kebijakan pariwisata, realisasi di tingkat implementasi seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang seharusnya diusung. Banyak kawasan wisata alam yang justru mengalami degradasi lingkungan sebagai akibat dari praktik wisata yang tidak terkontrol, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai daya dukung lingkungan, peningkatan jumlah kunjungan tanpa pengelolaan kapasitas, serta aktivitas wisata yang merusak habitat alami. Salah satu faktor utama penyebab kerusakan ini adalah kurangnya regulasi yang ketat dan belum optimalnya sistem pengawasan dari pihak pengelola atau pemerintah daerah (Walsh et al., 2019).

Selain itu, pemahaman dan kesadaran masyarakat lokal mengenai pentingnya konservasi lingkungan masih tergolong rendah, terutama di wilayah yang belum mendapatkan pendidikan lingkungan secara memadai. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat melihat kegiatan ekowisata semata-mata sebagai peluang ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap ekosistem yang menjadi sumber utama daya tarik wisata. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut berisiko menjadikan ekowisata hanya sebagai label tanpa substansi keberlanjutan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang strategi pengembangan ekowisata yang komprehensif dan kontekstual. Strategi tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek secara berimbang—mulai dari perlindungan ekologis, pemberdayaan sosial masyarakat lokal, hingga keberlanjutan ekonomi. Tidak hanya itu, perlu adanya sinergi antara pemangku kepentingan—pemerintah, komunitas lokal, pelaku industri pariwisata, dan lembaga konservasi—dalam menyusun kebijakan, merancang program, serta menerapkan praktik ekowisata yang benar-benar mendukung tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata sebagai bentuk pemberdayaan yang secara langsung mendukung upaya konservasi lingkungan (Stronza & Gordillo, 2008). Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya menciptakan rasa memiliki terhadap sumber daya alam di sekitarnya, tetapi juga membangun tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi ini dapat berbentuk berbagai aktivitas, mulai dari pengelolaan kawasan wisata, penyediaan jasa pemandu lokal, pelatihan keterampilan ramah lingkungan, hingga kegiatan edukatif bagi wisatawan. Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk terus menjaga dan melindungi aset lingkungan yang menjadi daya tarik wisata.

Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan ekowisata dapat menghindarkan konflik kepentingan antara pengelola wisata dan warga setempat. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan, maka strategi pengelolaan kawasan wisata cenderung lebih akomodatif terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional yang telah terbukti selaras dengan prinsip konservasi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memperkuat legitimasi sosial terhadap

kebijakan ekowisata yang diterapkan di suatu wilayah, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Keterlibatan ini pun berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami pentingnya ekosistem dan fungsi ekologisnya. Proses pembelajaran bersama, baik melalui pelatihan formal maupun pengalaman langsung di lapangan, membantu membentuk budaya konservasi yang hidup dalam komunitas. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kegiatan ekowisata, tetapi juga menjadi agen pelestarian lingkungan yang aktif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sarana pendidikan dan transformasi sosial menuju komunitas yang berdaya dan berwawasan lingkungan.

Di sisi lain, keberhasilan pengembangan ekowisata tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat lokal dan kesadaran wisatawan, tetapi juga sangat ditentukan oleh adanya kebijakan pemerintah yang mendukung serta ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kebijakan yang jelas, konsisten, dan terintegrasi menjadi kerangka penting dalam mengarahkan pengelolaan ekowisata agar sejalan dengan tujuan konservasi. Tanpa adanya kebijakan yang mendukung, pelaksanaan ekowisata berisiko kehilangan arah dan terjebak dalam praktik yang justru merusak lingkungan. Regulasi yang kuat diperlukan untuk mengatur aspek-aspek seperti jumlah maksimum kunjungan (carrying capacity), zonasi wilayah wisata, tata cara interaksi dengan satwa liar, serta standar operasional kegiatan wisata agar tidak membahayakan ekosistem yang ada.

Selain regulasi, dukungan dalam bentuk infrastruktur juga memainkan peran penting. Infrastruktur yang dirancang dengan prinsip keberlanjutan seperti jalur trekking berbahan alami, fasilitas sanitasi berbasis sistem limbah ramah lingkungan, sistem pengelolaan sampah terpadu, serta akses transportasi rendah emisi, dapat membantu mengurangi tekanan ekologis terhadap kawasan wisata alam. Fasilitas ini tidak hanya menunjang kenyamanan dan keamanan pengunjung, tetapi juga mendukung upaya edukasi dan konservasi dengan menunjukkan bagaimana wisata dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, minimnya infrastruktur yang sesuai atau pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat mempercepat kerusakan kawasan, memperbesar jejak ekologis wisatawan, dan menurunkan kualitas pengalaman ekowisata itu sendiri.

Lebih lanjut, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan dan pembangunan infrastruktur berjalan sinkron. Pemerintah daerah yang memahami kondisi lokal harus diberi ruang untuk berinovasi, namun tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional yang berpihak pada pelestarian lingkungan. Jika aspek regulasi dan infrastruktur ini diabaikan, maka ekowisata hanya akan menjadi varian lain dari pariwisata massal yang membawa dampak negatif seperti kerusakan habitat, polusi, dan degradasi budaya lokal (Honey, 1999). Oleh sebab itu, sinergi antara kebijakan dan pembangunan fisik yang berpihak pada keberlanjutan menjadi syarat mutlak dalam memastikan keberhasilan jangka panjang ekowisata sebagai alat konservasi.

Gap penelitian masih ditemukan dalam hal bagaimana strategi pengembangan ekowisata dapat secara langsung dikaitkan dengan upaya konservasi lingkungan, khususnya dalam konteks negara berkembang yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan ekologis yang kompleks. Sebagian besar studi ekowisata yang telah dilakukan cenderung lebih menyoroti aspek manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, seperti peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan komunitas, atau menekankan pada partisipasi sosial dalam pengelolaan kawasan wisata. Meskipun aspek-aspek tersebut penting, banyak dari studi tersebut belum secara eksplisit mengukur atau mengaitkan strategi pengembangan ekowisata dengan indikator-indikator konservasi yang konkret, seperti peningkatan populasi spesies kunci, pemulihan habitat, penurunan tekanan antropogenik, atau keberhasilan program reboisasi dan perlindungan kawasan lindung.

Ketiadaan keterkaitan langsung antara strategi ekowisata dan hasil konservasi menyebabkan sulitnya menilai efektivitas ekowisata sebagai alat pelestarian lingkungan. Di banyak kasus, ekowisata justru berisiko menjadi simbol semata tanpa kontribusi nyata terhadap pelestarian sumber daya alam apabila strategi pengelolaannya tidak dirancang secara ilmiah dan berbasis data. Hal ini diperparah oleh kurangnya monitoring dan evaluasi jangka panjang yang dapat menunjukkan dampak ekowisata terhadap perubahan kondisi ekologis suatu kawasan. Banyak program ekowisata tidak memiliki indikator lingkungan yang jelas, sehingga sulit untuk membedakan apakah perubahan yang terjadi di suatu kawasan disebabkan oleh intervensi ekowisata atau oleh faktor eksternal lainnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas institusi di negara berkembang dalam hal penelitian, pendanaan, dan teknologi konservasi juga menjadi penghambat dalam mengintegrasikan aspek ekowisata dan konservasi secara lebih sistematis. Penelitian yang ada seringkali bersifat deskriptif dan berfokus pada studi kasus lokal, tanpa adanya generalisasi atau model teoritik yang dapat diterapkan secara luas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan penelitian yang lebih interdisipliner dan kolaboratif, yang tidak hanya menggabungkan aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga ekologi, geospasial, dan ilmu lingkungan dalam merumuskan strategi pengembangan ekowisata yang benar-benar mendukung konservasi.

Dalam konteks ini, penting bagi studi-studi di masa mendatang untuk merancang kerangka analisis yang mampu mengevaluasi dampak ekowisata terhadap kondisi ekosistem secara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat kontribusi teoritis ekowisata dalam studi pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Dengan demikian, gap penelitian yang selama ini ada dapat diisi dengan temuan-temuan yang lebih relevan, aplikatif, dan berdampak langsung terhadap konservasi lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengembangan ekowisata yang efektif dalam mendukung konservasi lingkungan di kawasan wisata alam. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur ekowisata serta implikasi praktis bagi pengelola dan pemangku kebijakan pariwisata.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di kawasan konservasi alam Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan (Mei–Juli 2025) melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan 15 informan kunci (pengelola kawasan, pelaku wisata, masyarakat lokal), serta studi dokumen dan literatur ilmiah terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan langkah-langkah coding terbuka, axial coding, dan selective coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan strategi ekowisata dan konservasi lingkungan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan member checking dengan informan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal merupakan strategi kunci yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan ekowisata yang berorientasi pada konservasi lingkungan. Keterlibatan mereka bukan hanya sekadar pelengkap program wisata, melainkan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan wisata alam secara berkelanjutan. Masyarakat lokal umumnya memiliki pengetahuan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, kearifan lokal yang berakar pada praktik hidup selaras dengan alam, serta kedekatan emosional dan historis terhadap wilayah tempat tinggal mereka. Faktor-faktor ini menjadikan mereka aktor penting yang mampu memahami dinamika ekosistem secara lebih mendalam dibandingkan pihak luar.

Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan wisata—baik melalui pengelolaan homestay yang ramah lingkungan, penyediaan jasa pemanduan berbasis interpretasi ekologi, penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, maupun patroli kawasan untuk mencegah perambahan hutan dan perburuan liar—mereka cenderung memiliki rasa memiliki yang kuat serta tanggung jawab yang tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan. Keterlibatan ini tidak hanya mendorong terciptanya ekosistem wisata yang lebih lestari, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peluang usaha baru, memperkuat identitas budaya lokal, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian alam demi generasi mendatang. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat lokal dapat dipandang sebagai pilar utama yang menjembatani kepentingan konservasi dengan pembangunan ekonomi berbasis ekowisata yang inklusif.

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang secara aktif dilibatkan dalam pengelolaan destinasi wisata menunjukkan tingkat komitmen yang sangat tinggi terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di sekitarnya. Komitmen tersebut tidak hanya terwujud dalam bentuk sikap positif, tetapi juga tercermin dari serangkaian tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Masyarakat membentuk kelompok kerja bakti yang secara rutin menjaga kebersihan kawasan, baik di area inti destinasi maupun wilayah penyangga, guna memastikan kenyamanan pengunjung dan mencegah pencemaran lingkungan. Mereka juga terlibat dalam kegiatan pengawasan dan patroli lapangan untuk memantau aktivitas perburuan liar, perambahan hutan, dan praktik eksploitasi sumber daya yang berpotensi merusak ekosistem.

Selain itu, tata kelola sampah menjadi perhatian penting bagi masyarakat, di mana mereka mengembangkan sistem pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah yang mengedepankan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Upaya ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang mencemari lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan nilai ekonomi melalui pemanfaatan kembali bahan yang dapat didaur ulang. Di sisi lain, masyarakat turut mengambil peran sebagai penyampai informasi dan pendidik lingkungan bagi wisatawan. Mereka secara aktif memberikan penjelasan tentang aturan, larangan, dan etika berwisata di alam terbuka, termasuk pentingnya menjaga flora dan fauna lokal, tidak membuang sampah sembarangan, serta menghormati situs-situs budaya dan sejarah setempat.

Rangkaian kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan risiko degradasi lingkungan akibat aktivitas pariwisata. Lebih jauh, partisipasi aktif tersebut memperkuat posisi masyarakat sebagai penjaga kawasan sekaligus pelaku utama dalam konservasi berbasis komunitas. Peran ini menjadikan mereka mitra strategis bagi pemerintah daerah, pengelola wisata, dan pihak terkait lainnya dalam mewujudkan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang memperkokoh fondasi ekowisata berkelanjutan di kawasan tersebut.

Lebih dari sekadar keterlibatan fisik, partisipasi ini turut membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung melalui sektor-sektor turunan ekowisata. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan wisata digunakan untuk mendukung kebutuhan hidup, memperbaiki fasilitas umum desa, serta mendanai inisiatif lokal untuk pelestarian lingkungan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat bukan hanya membangun ketahanan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan insentif sosial yang memperkuat komitmen terhadap konservasi. Dalam jangka panjang, partisipasi ini membentuk siklus positif: semakin besar keterlibatan masyarakat, semakin kuat pula dorongan mereka untuk menjaga lingkungan sebagai aset wisata yang berharga.

Namun, partisipasi masyarakat tidak dapat muncul secara spontan tanpa adanya dukungan yang memadai dari pihak lain, khususnya pemerintah dan lembaga pendukung. Fasilitasi berupa pelatihan, pendampingan teknis, akses terhadap informasi, dan insentif finansial sangat dibutuhkan untuk

memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata berbasis konservasi. Selain itu, keberadaan mekanisme kolaboratif yang demokratis dan transparan juga penting agar semua pihak dapat terlibat secara adil dan efektif. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, ekowisata tidak hanya menjadi sarana rekreasi dan ekonomi, tetapi juga instrumen transformasi sosial dan perlindungan lingkungan jangka panjang.

Strategi kedua yang teridentifikasi adalah pendidikan lingkungan melalui interpretasi wisata. Penyediaan papan informasi, pelatihan pemandu wisata, dan kegiatan edukatif terbukti efektif meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam (Ballantyne & Packer, 2011).

Selanjutnya, penguatan regulasi dan penegakan hukum menjadi elemen penting dalam mencegah aktivitas yang merusak kawasan. Adanya aturan pembatasan jumlah pengunjung, zonasi kegiatan wisata, dan larangan penggunaan plastik sekali pakai memberikan dampak positif terhadap kondisi ekosistem.

Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan seperti jalur trekking alami, fasilitas sanitasi kompos, dan penggunaan energi terbarukan turut mendukung prinsip ekowisata. Infrastruktur ini tidak hanya meminimalkan dampak ekologis tetapi juga memberikan kenyamanan bagi wisatawan tanpa mengorbankan lingkungan (Fennell, 2014).

Diskusi juga menyoroti bahwa keberhasilan strategi-strategi tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, komunitas lokal, dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan ekowisata yang efektif dalam mendukung konservasi lingkungan meliputi partisipasi masyarakat lokal, pendidikan lingkungan, penguatan regulasi, dan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan. Implementasi strategi tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor dan perencanaan yang berorientasi jangka panjang. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi para pengambil kebijakan dalam merancang program ekowisata yang mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi indikator keberhasilan konservasi berbasis ekowisata dalam jangka panjang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Taman Nasional Gunung Leuser, masyarakat Desa Bukit Lawang, serta seluruh informan yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana atas dukungan pendanaan.

Daftar Pustaka

Ballantyne, R., & Packer, J. (2011). Using tourism free-choice learning experiences to promote environmentally sustainable behaviour: The role of post-visit ‘action resources’. Environmental Education Research, 17(2), 201–215. https://doi.org/10.1080/13504622.2010.530645

Buckley, R. (2010). Conservation tourism. CABI Publishing.

Drumm, A., Terborgh, J., Patterson, C., Soles, A., & Moore, A. (2004). Ecotourism Development: A Manual for Conservation Planners and Managers: The Business of Ecotourism Development and Management. Nature Conservancy.

Fennell, D. A. (2014). Ecotourism (5th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429325166

Garrod, B. (2008). Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon. Taylor & Francis / Routledge.

Gössling, S., & Hall, C. M. (Eds.). (2006). Tourism and Global Environmental Change. Routledge. DOI: 10.4324/9780203011911

Honey, M. (1999). Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? (2nd ed.). Island Press.

Kiss, A. (2004). Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds? Trends in Ecology & Evolution, 19(5), 232–237. https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.03.010

Orams, M. B. (1995). Towards a more desirable form of ecotourism. Tourism Management, 16(1), 3–8.

Ross, S., & Wall, G. (1999). Ecotourism: Towards congruence between theory and practice. Tourism Management, 20(1), 123–132. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00098-3

Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20(2), 245–249. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7

Stronza, A., & Gordillo, J. (2008). Community views of ecotourism. Annals of Tourism Research, 35(2), 448–468. https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.01.002

Walsh, T., & George, B. (2019). The ecotourism principle-practice divide: Factors that limit the applicability of ecotourism principles into practice. Revista Turismo Estudos e Práticas-RTEP/GEPLAT/UERN, 8(2), 170–198.

Wearing, S., & Neil, J. (2009). Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities? (2nd ed.). Elsevier.

Weaver, D. (2001). Ecotourism as mass tourism: Contradiction or reality? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(2), 104–112. https://doi.org/10.1177/0010880401422009